

FASILITASI AKSES PEMBIAYAAN BAGI PELAKU UMKM TERDAMPAK COVID-19 DI BANDA ACEH

Hamdani¹, Josi Farmiati², Munawir³

^{1,2}Polteknik Kutaraja, Banda Aceh

³AMIK Indonesia, Banda Aceh

Co.E-mail : hamdani@poltekkutaraja.ac.id¹

Author E-Mail : jfarmiati@gmail.com², muna.janeeta@gmail.com³

Article History:

Received: 10-06-2021

Revised: 17-06-2021

Accepted: 09-07-2021

Keywords: Business assistance; MSMEs; Startup Capital; MSME Credit; KUR

Kata kunci: Pendampingan usaha; UMKM; Modal Usaha; Kredit UMKM; KUR

Abstract: Community service focuses on MSMEs affected by Covid-19 for businesses run by 32 business actors in Banda Aceh City. The form of activity is in the form of specific business assistance in financing facilitation to bank financial institutions to obtain working capital and investment. The facilitation method carried out is in the form of training on credit and banking, business mentoring, and business coaching which lasts for 3 months involving cross-related agencies. The results of the service activities are the increasing number of MSMEs that are bankable and fulfill aspects of good business management in accordance with bank requirements to obtain business capital loans. Of the 32 program participants, 62.5 percent are already bankable, while 37.5 percent need further assistance.

Abstrak: Pengabdian masyarakat berfokus pada UMKM yang terdampak Covid-19 terhadap usaha yang dijalankan oleh 32 pelaku usaha di Kota Banda Aceh. Bentuk kegiatan berupa pendampingan usaha yang spesifik pada fasilitasi pembiayaan ke lembaga keuangan bank untuk mendapatkan modal kerja dan investasi. Metode fasilitasi yang dijalankan berupa pelatihan tentang kredit dan perbankan, mentoring bisnis, dan business coaching yang berlangsung selama 3 bulan dengan melibatkan lintas instansi terkait. Hasil dari kegiatan pengabdian yaitu meningkatnya jumlah UMKM yang bankable dan memenuhi aspek manajemen usaha yang baik sesuai dengan persyaratan bank untuk memperoleh pinjaman modal usaha. Dari 32 peserta program 62,5 persen sudah bankable sedangkan 37,5 persen membutuhkan pendampingan lebih lanjut.

Pendahuluan

Pandemi Coronavirus Disease 19 atau lebih dikenal dengan singkatan Covid-19 telah memberikan perubahan yang sangat besar terhadap tatanan sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Perubahan tersebut telah menimbulkan beberapa gejolak di tengah-tengah masyarakat yang sebelumnya hidup secara normal dengan kebiasaan dan budaya masing-masing. Namun dengan munculnya Covid-19 yang pertama sekali terjadi di Wuhan, Tiongkok yang mulai merebak pada tahun 2019 lalu telah menjadi

permasalahan global yang membutuhkan penanganan bersama antar Negara tak terkecuali Indonesia.

Menurut laporan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), (2020), dampak ekonomi akibat pandemik Covid-19 bagi perekonomian Asia yang berkembang (Emerging Asia) mengalami pertumbuhan negatif rata-rata minus 2,9% pada tahun 2020. Sementara perekonomian di ASEAN tambah laporan tersebut mengatakan pertumbuhan ekonomi rata-rata minus 2,8% atau lebih rendah di Asia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Republik Indonesia sendiri menurunkan laporan yang mengatakan bahwa tekanan yang dihadapi ekonomi global akibat COVID-19 berada pada magnitude yang sangat tinggi dan terburuk sejak krisis keuangan global di 2008/2009 [1]. International Monetary Fund (IMF) mengestimasi potensi kerugian dunia akibat pandemik COVID-19 secara kumulatif di tahun 2020 dan 2021 mencapai USD9 triliun atau lebih besar dari gabungan ukuran ekonomi Jepang dan Jerman.

Perubahan perekonomian global tersebut tentu saja berdampak terhadap ekonomi domestik Indonesia hingga perekonomian ke level daerah seperti tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pada tataran perekonomian daerah, dampak yang berpengaruh signifikan yaitu terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan OECD menyebutkan pandemi ini berimplikasi terhadap ancaman krisis ekonomi besar yang ditandai dengan terhentinya aktivitas produksi di banyak negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah kepada ketidakpastian [2].

Pandemi Covid-19 saat ini telah berubah menjadi tantangan yang sangat berat bagi bangsa Indonesia. Tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi khususnya UMKM, dan kesejahteraan bahkan tak jarang menjadi tantangan politik [3]. Sehingga pemerintah merespon situasi tersebut dengan menjalankan beberapa kebijakan yang dapat membantu roda ekonomi makro dan mikro seperti UMKM agar dapat bertahan dan terus bergerak di tengah krisis.

Salah satu kebijakan pemerintah adalah dengan menggelontorkan stimulus ekonomi yang sangat besar melalui instrumen fiskal dan moneter [4]. Pemerintah memberikan berbagai bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pelaku UMKM yang jumlahnya mencapai 60 juta unit lebih yang tersebar di seluruh Indonesia. Langkah-langkah kebijakan tersebut dilakukan dengan tujuan utama yakni akselerasi atau mempercepat penanganan COVID-19 hingga upaya mitigasi dampak ekonomi dan keuangan.

Mengenai bantuan yang disediakan bagi UMKM sebagaimana dipaparkan di atas, pemerintah mengoptimalkan peran Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop dan UKM), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang merupakan lembaga teknis yang ditugaskan oleh presiden hingga melibatkan lembaga keuangan perbankan. Diantara bantuan yang terkait langsung dengan permasalahan yang dihadapi UMKM adalah aspek permodalan dan pinjaman

bank.

Diantara bantuan pemerintah yaitu memberikan kelonggaran pembayaran cicilan pinjaman bank bagi UMKM terdampak Covid-19, keringanan pajak menjadi 0,5%, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau bantuan langsung tunai (BLT) UMKM. Tidak hanya itu pemerintah juga menyusun kebijakan strategis terkait Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan menaikkan plafon kredit tanpa agunan hingga Rp100 Juta.

Akselerasi pembiayaan dan investasi termasuk membuka akses KUR seluas-luasnya bagi UMKM merupakan salah satu dari enam (6) program strategis menjadi prioritas pemerintah selama periode 2020-2024 yang memberikan kemudahan bagi dukungan permodalan usaha.

Meskipun demikian menurut laporan Bank Indonesia Provinsi Aceh (2020) ternyata tingkat daya serap terutama kredit investasi produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM masih sangat rendah atau sebesar 10% dari total outstanding yang ada. Sementara data Kementerian Perekonomian per Februari 2021 mempublikasi realisasi KUR secara nasional baru mencapai Rp38,7 triliun dengan jumlah debitur 1.066.083 atau 15,29% dari target Rp253 triliun hingga 2021.

Rendahnya daya serap KUR oleh UMKM di Aceh telah memunculkan tanda tanya penulis apakah permasalahan yang dihadapi? Benarkah mengakses kredit KUR termasuk sulit? Bagaimana pula kemampuan UMKM menyediakan seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank penyalur KUR. Dari hasil survei yang penulis lakukan terhadap 32 UMKM di Banda Aceh menunjukkan bahwa permasalahan utama yaitu belum tersedianya administrasi usaha seperti laporan keuangan yang dipersyaratkan oleh bank. Selain itu UMKM juga tidak memiliki agunan yang cukup meskipun secara aturan KUR ultramikro dan mikro tidak diwajibkan agunan tambahan namun pihak bank tetap mensyaratkan.

Persoalan lain yang muncul di lapangan yaitu pelaku UMKM tidak memahami prosedur pengajuan KUR [5]. Pada umumnya mereka dibantu oleh jasa pendampingan usaha yang diberikan oleh beberapa lembaga yang konsen pada program pemberdayaan UMKM dan fasilitasi akses pembiayaan [6].

Berdasarkan latar belakang itulah penulis merancang program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dengan melaksanakan kegiatan pendampingan akses pembiayaan atau fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM terdampak Covid-19 yang ada di Kota Banda Aceh dengan target terbukanya akses informasi dan pemahaman pelaku UMKM terhadap produk KUR.

Metode

Program kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini diawali dengan melakukan survei awal terhadap 20 pelaku UMKM di Banda Aceh dan sekitarnya juga mengkaji laporan-laporan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dan

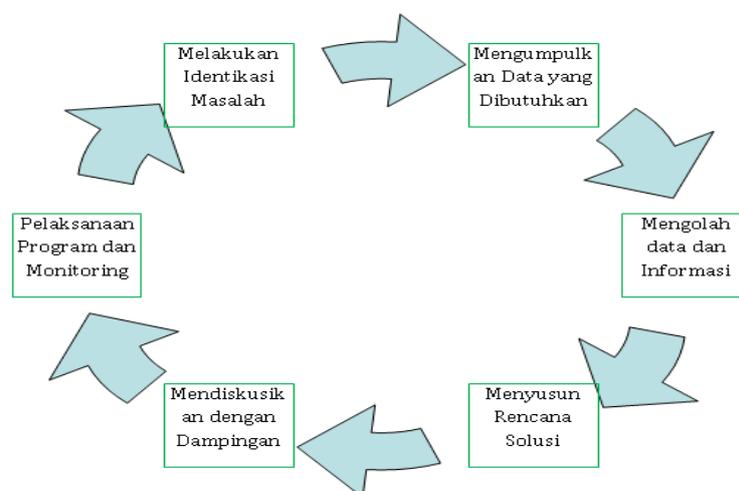
laporan Bank Indonesia/OJK Aceh. Kemudian tim penulis mengadakan sebuah diskusi grup forum (*Forum Group Discussion/FGD*) pada 26 Maret 2021 untuk menggali berbagai informasi tentang aspek permodalan usaha UMKM khususnya modal investasi produk KUR yang dikucurkan oleh pihak lembaga keuangan perbankan terhadap sektor UMKM.

Hasil berbagai studi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga seperti ILO, IFC, ADB dan institusi lokal seperti TNP2K, masalah akses keuangan terjadi akibat adanya gap informasi di antara UMKM dan lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank . Banyak UMKM belum memiliki kemampuan manajerial keuangan sehingga sulit menjadi *bankable* [7]. Kenyataan ini semakin menguatkan dugaan tim penulis untuk memberikan layanan pendampingan usaha bagi UMKM agar usaha mereka menjadi *bankable* dan bisa memenuhi persyaratan bank untuk mengakses pembiayaan.

Adapun yang menjadi subyek kegiatan pengabdian yaitu komunitas UMKM sektor kelautan dan perikanan sebanyak 30 pelaku usaha yang ada di Kota Banda Aceh yang sudah terdata di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh. Pelaksanaan pengabdian ini berlokasi di Banda Aceh yang berlangsung selama Maret-Mei 2021 dengan melibatkan seluruh *stakeholder* untuk berkolaborasi dan akselerasi pengembangan UMKM.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan ini adalah tim penulis (dosen Politeknik Kutaraja dan AMIK Indonesia), Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh, Bank Syariah Indonesia (BSI) eks Bank Syariah Mandiri Kantor Regional Aceh dan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP).

Kegiatan perencanaan pengabdian ini diawali dengan melakukan koordinasi lintas instansi dan selanjutnya melakukan identifikasi permasalahan yang dihadapi oleh subyek pengabdian sebelum memutuskan strategi pelaksanaan yang tepat sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Langkah-langkah tersebut diperlihatkan pada skema berikut ini:



Gambar 1. Siklus Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

Dari diagram di atas dapat dilihat bahwa metode pengabdian ini berbasis pada kebutuhan dampingan dan bersifat partisipatif. Langkah-langkah tersebut akan

dijelaskan di bawah ini:

1. Melakukan identifikasi masalah; pada bagian ini penulis dan tim melakukan inventarisasi permasalahan yang dihadapi oleh UMKM dan pihak perbankan dalam akses pembiayaan modal usaha terutama produk KUR.
2. Mengumpulkan data yang dibutuhkan; metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu melalui wawancara, observasi langsung kondisi lapangan, dan focus discussion group (FGD).
3. Mengolah data dan informasi; setelah semua data dan informasi terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang valid dan dapat dipercaya tentang kondisi utuh yang sebenarnya sehingga bisa disusun strategi penyelesaian masalah.
4. Menyusun rencana solusi; setelah masalah teridentifikasi dengan jelas, langkah berikutnya yaitu menyusun strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan pendekatan yang disepakati bersama dengan menetapkan beberapa alternative solusi.
5. Mendiskusikan dengan dampingan; alternatif solusi yang dipilih memerlukan partisipasi dan peran aktif UMKM dampingan yaitu pemilik bisnis itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang sama mengenai solusi yang akan dijalankan.
6. Monitoring pelaksanaan program; Guna melakukan monitoring dan evaluasi secara periodic terhadap pelaksanaan program pendampingan dan fasilitasi pembiayaan. Penulis dan tim mengacu kepada rencana solusi yang dibuat sebelumnya, target pencapaian, target waktu dan hasil yang diharapkan.

Metode yang dijalankan dalam kegiatan pengabdian ini adalah pendampingan UMKM dengan memberikan training, mentoring, dan business coaching yang relevan dengan kapasitas dan kebutuhan.

Hasil

Hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dicapai menunjukkan adanya perubahan pengetahuan UMKM dampingan terhadap masalah yang dihadapi. Hal ini ditandai dengan peningkatan pengetahuan mereka tentang perbankan dan pembiayaan baik produk murabahah, mudharabah, dan ijarah. Perubahan ini terjadi karena pada proses pendampingan telah dilakukan serangkaian pelatihan dan sosialisasi mengenai perbankan dan produk pembiayaan oleh narasumber terutama tim pengabdian juga pihak Bank BSI Aceh.



Gambar 2. Sosialisasi Produk Perbankan

Pada gambar 2 diatas memperlihatkan kegiatan sosialisasi produk perbankan kepada UMKM dampingan oleh pemateri dari Bank BSI Aceh yang berlangsung pada Rabu, 31 Maret 2021 ruang rapat Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh.

Dalam kesempatan tersebut juga hadir dari pihak Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh serta Bank Aceh Syariah (BAS) mewakili bank daerah untuk UMKM. Pemateri menjelaskan tentang prosedur pengajuan pembiayaan terutama produk KUR dengan pola eksekuting dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur saat pemberkasan.



Gambar 3. Pelatihan Penyusunan Laporan Keuangan

Tim pengabdian dan penulis memberikan materi tentang Laporan Keuangan UMKM untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang literasi keuangan sebagaimana diperlihatkan pada gambar 3 di atas. Pengetahuan terkait pengelolaan keuangan usaha dan penyusunan laporan keuangan usaha merupakan aspek sangat penting dalam proses pengajuan pembiayaan ke perbankan . Adapun materi yang

diberikan pada kegiatan pelatihan tersebut yaitu:

1. Pengantar laporan keuangan.
2. Tujuan pelaporan usaha UMKM.
3. Jenis laporan keuangan.
4. Penyusunan laporan keuangan.
5. Pengenalan Sistem Aplikasi Pencatatan Informasi Keuangan (SiApik). Aplikasi SiApik dapat diakses secara online melalui laman resmi Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/siapik/>) kemudian melakukan pendaftaran akun perusahaan atau badan usaha yang sedang dijalankan.



Gambar 4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan UMKM

Kegiatan pengabdian juga melakukan pendampingan langsung ke UMKM dengan memberikan praktik penyusunan laporan keuangan seperti ditunjukkan pada gambar 4. Bahkan beberapa UMKM sudah mulai mengenal aplikasi keuangan UMKM SIAPIK [8],[9] yang dirancang oleh Bank Indonesia untuk kemudahan UMKM mengelola keuangan usaha mereka.



Gambar 5. Koordinasi dengan Pihak Bank BSI untuk Akses Pembiayaan UMKM

Berkolaborasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh beserta tenaga penyuluh perikanan di lapangan penulis melakukan koordinasi dengan pihak bank BSI Aceh untuk membantu UMKM dalam upaya fasilitasi akses pembiayaan usaha. Pertemuan tersebut menghasilkan kerjasama secara konkrit antara Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh dengan PT Bank BSI Aceh sebagai turunan dari Memorandum of Understanding (MoU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk fasilitasi akses permodalan UMKM.

Diskusi

Pengabdian fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM perikanan di Kota Banda Aceh yang penulis laksanakan telah berhasil membangun kerjasama lintas instansi sehingga secara bersama-sama memiliki visi yang bermuara kepada pemberdayaan UMKM yang selama ini temarginalkan. Kesulitan yang dialami oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan tidak saja sebagai fakta namun telah menjadi momok yang menakutkan bagi mereka untuk masuk ke sistem perbankan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi sulitnya UMKM mendapatkan kepercayaan bank dalam hal pinjaman modal adalah disebabkan ketidaksiapan calon debitur untuk menyiapkan persyaratan yang telah ditetapkan [10]. Temuan tersebut menjelaskan bahwa syarat utama dari persetujuan kredit/pembiayaan adalah kelayakan usaha sesuai dengan standar bank penyalur. Selain itu juga calon debitur secara suka rela menyerahkan agunan sebagai jaminan tambahan kepada bank atas pinjaman yang akan diberikan.

Akan tetapi kelemahan yang paling krusial dirasakan oleh UMKM dalam hal persyaratan itu adalah tidak memiliki pencatatan keuangan usaha yang tertib, teratur, dan memenuhi kaedah laporan keuangan UMKM. Inilah yang membuat penilaian kelayakan usaha sulit dilakukan oleh pihak bank terutama untuk melihat bagaimana kemampuan bayar (*repayment capacity*) [11] calon debitur yang akan dibiayai .

Namun setelah kegiatan pengabdian ini dilakukan selama periode Maret s.d Mei 2021 pemahaman pelaku UMKM terhadap manajemen usaha khususnya tentang pengelolaan keuangan usaha yang dibuktikan dengan laporan keuangan meningkat signifikan. Dari seluruh peserta yang ikut program pendampingan ini yaitu sebanyak 32 orang sebanyak 62,5 persen sudah bankable. Artinya mampu menyiapkan persyaratan administrasi usaha untuk pengajuan pembiayaan/kredit sesuai dengan ketentuan bank.

Kesimpulan

Pandemi Covid-19 tidak hanya mempengaruhi secara negative terhadap ekonomi global juga telah memberikan dampak yang meluas terhadap perekonomian nasional yang dirasakan secara langsung oleh UMKM di Banda Aceh. Kerja keras pemerintah bersama-sama dengan masyarakat dalam mengatasi krisis kesehatan dan

menjaga stabilitas ekonomi rakyat patut diapresiasi. Kebijakan positif yang terkait secara langsung terhadap UMKM yaitu adanya kelonggaran pembayaran pinjaman, keringanan pajak, dan kredit usaha rakyat (KUR) tanpa agunan tambahan pada skim tertentu.

Akan tetapi kebijakan pemerintah tentang KUR tanpa agunan tersebut ternyata di lapangan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh bank penyalur KUR tetap saja mengambil agunan tambahan dalam praktiknya sehingga hal ini menjadi faktor penghambat bagi akselerasi UMKM untuk keluar dari krisis akibat Covid-19. Ditambah pula ketidakpahaman UMKM tentang prosedur pengajuan pembiayaan/kredit bank telah menambah lemahnya posisi UMKM dalam sistem perbankan.

Permasalahan yang ada tersebut kemudian berhasil dipecahkan dengan kegiatan pengabdian, di mana UMKM yang membutuhkan dukungan bank untuk modal usaha sudah mampu menyiapkan berkas persyaratan sesuai dengan standar bank. Ini artinya UMKM telah dapat disebut bankable. Hasil positif yang diperoleh dari pengabdian ini menunjukkan bahwa pendampingan UMKM sangat tepat dilakukan sebagai salah satu model kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen atau perguruan tinggi khususnya pemberdayaan UMKM.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih kepada Direktur Politeknik Kutaraja, Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Kutaraja yang telah membantu dan mendukung kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM), Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh yang telah memberikan kesempatan pengabdian dan bekerjasama dalam pelaksanaan, Kepala Cabang Bank BSI Aceh, Tenaga Pendamping Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (TP-LPMUKP), Penyuluh Perikanan, dan dosen Politeknik Kutaraja yang melaksanakan kegiatan ini secara baik dan terstruktur sehingga menghasilkan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat lua dan khususnya pelaku UMKM yang menjadi subyek pendampingan.

Daftar Referensi

- [1] Kementerian Keuangan. "Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2021." Situs Resmi kemenkeu.go.id (2021)
- [2] Pakpahan, Aknolt Kristian. "Covid-19 Dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* (2020): 59-64
- [3] Damuri, Yose Rizal, et al. "Langkah Pemberdayaan UMKM Dalam Menghadapi Covid-19." CSIS Policy Paper. Jakarta: CSIS Indonesia (2020).
- [4] Sumardi, D., Falah, S., Jauhari, M. A., & Radiana, A. (2020). Baitul Mal dan tantangan kemiskinan dampak pandemic Covid-19 perspektif filsafat Hukum Islam. LP2M.

-
- [5] Anggraini, D., & Nasution, S. (2013). Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan (Studi Kasus Bank Bri). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 14879.
- [6] Simaremare, M., & Hidayat, P. (2013). Analisis Estimasi Permintaan Dan Penawaran Kredit Konsumsi Di Sumatera Utara (Periode 1990-2011). *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(3), 14725.
- [7] Syamsul Rizal, Munawir. "Pengaruh Kepuasan Nasabah Terhadap Menggunakan Mobile Banking (M-Banking) Pada Bank BCA Cabang Banda Aceh." *Jurnal Ekonomi dan Manajemen Teknologi 1.2* (2017): 2017.
- [8] Dewi, S. N., Haryanto, A. T., & Santosa, J. (2020). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana Menggunakan Aplikasi SIAPIK Bagi UMKM Keset Perca Di Desa Ngasinan Etan Kelurahan Gebang. *Jurnal Abdidas*, 1(6), 805-811.
- [9] Rinandiyana, L. R., Kusnandar, D. L., & Rosyadi, A. (2020). Pemanfaatan Aplikasi Akuntansi Berbasis Android (SIAPIK) untuk meningkatkan Administrasi Keuangan UMKM. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 73-78.
- [10] Hamdani, Hamdani, Ismail Ismail, and Thasrif Murhadi. "Analisis Kredit UMKM di Provinsi Aceh: Analisis Empiris Vector Error Correction Model (VECM)." *Jurnal EMT KITA 4.2* (2020): 59-70.
- [11] Tristingtyas, V., Mutaher, O., Osmad Mutaher, D., & Si, M. (2013). *Jurnal Akuntansi Indo N E S I a* 131 Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 3(2), 131-145.